

Optimalisasi Sektor Basis Untuk Meningkatkan Perekonomian Lokal di Kabupaten Indramayu

Sulistianingsih^a, Tanti Piani Puspita^b

^{a,b}Pusjar SKTAN LAN

e-mail : ^atiasuliz@gmail.com, ^bpianipuspita@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari Kajian ini adalah untuk mengkaji optimalisasi sektor basis dalam peningkatan perekonomian lokal di Kabupaten Indramayu. Indramayu sebagai salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah, khususnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta pertambangan dan penggalian yang menjadi sektor basis utama. Akan tetapi, kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat belum optimal, dapat terlihat masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Metode analisis yang digunakan adalah *Location Quotient* (LQ) untuk mengidentifikasi sektor basis, dan analisis deskriptif untuk menilai kontribusi dan tantangan pengembangan sektor tersebut. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwasanya sektor basis berpotensi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi lokal jika dikelola secara tepat melalui peningkatan produktivitas, pengembangan industri pengolahan, serta dukungan infrastruktur yang memadai. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat juga diperlukan untuk memperkuat daya saing daerah. Dengan strategi optimalisasi yang terarah, sektor basis diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indramayu.

Kata Kunci : Sektor Basis, Perekonomian Lokal, Optimalisasi, Indramayu.

Optimization of Basic Economic Sectors to Strengthen Local Economy in Indramayu

Abstract

This study aims to examine the optimization of base sectors to improve the local economy in Indramayu Regency. As one of the regions in West Java, Indramayu possesses abundant natural resources, particularly in the agriculture, forestry, and fisheries sector as well as the mining and quarrying sector, which are identified as its main base sectors. However, the contribution of these sectors to community welfare remains suboptimal, as reflected by the high poverty rate and income inequality. The research employs the Location Quotient (LQ) method to identify base sectors, combined with descriptive analysis to evaluate their contribution and development challenges. The findings indicate that base sectors can serve as key drivers of local economic growth if properly managed through productivity enhancement, development of processing industries, and adequate infrastructure support. Furthermore, improving human resource capacity and fostering collaboration between government, private sector, and local communities are essential to strengthen regional competitiveness. With well-directed optimization strategies, base sectors are expected to foster sustainable economic growth, create wider employment opportunities, and improve the welfare of the people in Indramayu.

Keywords: Base Sector, Local Economy, Optimization, Indramayu.

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Indramayu merupakan kabupaten terluas ketujuh dari 27 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, dengan luas sebesar 2.076,06 km². Dengan kekuatan luas wilayah tersebut, seharusnya sumber daya alam yang ada dapat menopang perekonomian masyarakat Indramayu, namun mirisnya Indramayu masih memiliki persentase penduduk miskin yang berada di urutan pertama di antara semua Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat (BPS, 2024).

Jumlah penduduk Indramayu sebanyak 1.932.520 orang (3,81%) dari total penduduk Provinsi Jawa Barat. Sebanyak 212.140 penduduk miskin dari total penduduk Indramayu, sehingga menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mencapai cita-cita pemerintah untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2029.



Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin

Sumber: data BPS diolah (2025).

Kajian terdahulu menyatakan bahwa sektor yang sangat potensial bagi Kabupaten Indramayu adalah sektor pertanian, karena memberikan sumbangan terhadap perekonomian Indramayu (Riyatno et al., 2023). Selain itu, Indramayu dikenal sebagai lumbung padi Jawa Barat sehingga sektor pertanian menjadi sektor unggulan. Kajian lainnya (Faqih, 2021), mengemukakan pertumbuhan ekonomi mengalami

peningkatan dengan adanya kontribusi dari sektor pertanian, dimana menyumbang 20,12 persen dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2019. Kajian lainnya yang ditulis oleh (Hamdani & Susanto, 2021), dimana padi sawah menjadi komoditas pangan unggulan paling banyak di Kabupaten Indramayu.

Optimalisasi sektor basis merupakan upaya yang melampaui sekadar analisis ekonomi murni, sebab keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan dan implementasi kebijakan publik yang secara efektif dapat menjadi daya dukungnya. Literatur pendukung memberikan kerangka kontekstual yang kuat mengenai bagaimana administrasi publik yang efektif menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan inisiatif pembangunan ekonomi. Aspek pertama yang krusial adalah Pengelolaan Keuangan dan Kebijakan Fiskal Lokal, di mana optimalisasi membutuhkan ketersediaan sumber daya finansial yang memadai. Penelitian sebelumnya menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah, baik melalui kebijakan perpajakan dan retribusi yang efektif (Ramdani, Abubakar, Dawud, 2021; Abubakar & Ginka, 2024), maupun melalui pengelolaan transfer dana dari pusat ke daerah (Akbar, et al., 2023). Pengelolaan keuangan yang optimal inilah yang pada akhirnya akan mampu menyediakan modal investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan sektor basis. Selanjutnya, Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan menjadi kunci efisiensi (Taryono et al., 2025; 2021 Ahmad dan Taryono, 2021). Penerapan sistem *e-government*, seperti yang diteliti dalam konteks Musrenbang Desa (Abubakar & Prasetya, 2025), dan upaya nyata dalam simplifikasi birokrasi (Susawati, Nugraha, & Priyantoro, 2025), secara jelas menunjukkan bahwa inovasi administrasi sangat esensial untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Birokrasi yang *agile* dan transparan akan memegang peran penting dalam mempercepat perizinan dan berbagai dukungan yang diperlukan untuk investasi di sektor unggulan. Aspek ketiga, yaitu Pembangunan Partisipatif dan Kolaborasi, menegaskan bahwa pengembangan sektor basis adalah tanggung jawab bersama; penelitian telah menyoroti pentingnya program pembangunan yang bersifat partisipatif (Anomsari & Abubakar, 2019) dan peran vital pemberdayaan masyarakat (Hisanah, et al., 2024) dalam implementasi kebijakan. Model kolaborasi (Maharani, et al., 2023; Maharani & Abubakar, 2024) adalah mekanisme untuk memastikan bahwa setiap program pengembangan sektor basis memperoleh dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat luas. Akhirnya, perlu dipertimbangkan Peran Pemerintah Desa dalam Kesejahteraan, karena sektor basis yang kuat pada tingkat kabupaten secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan hingga ke tingkat desa. Penggunaan dana desa yang efektif telah terbukti signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (Wijayanti & Taufik, 2022), sehingga penelitian ini akan mengkaji bagaimana hasil optimalisasi sektor basis di level kabupaten dapat ditransformasikan menjadi program yang berdampak langsung di desa, juga dengan memperhatikan perspektif perangkat desa terkait risiko dan tata kelola (Taufik, Pradesa, & Agustina, 2022).

Nilai kebaruan yang diangkat dalam kajian ini adalah adanya anomali di mana Indramayu yang mempunyai sektor unggulan yang sangat potensial, namun patut dipertanyakan Indramayu menjadi Kabupaten dengan penduduk termiskin di Jawa Barat. Sehingga tulisan ini berupaya mencari sektor unggulan menggunakan metode pendekatan kuantitatif, dengan alat analisis yang dipakai adalah analisis *Location Quotient (LQ)*. Diharapkan

setelah mengetahui sektor-sektor unggulan yang dimiliki oleh Indramayu, dapat dicari strategi agar Indramayu terlepas dari belenggu kemiskinan. Tujuan dari artikel ini untuk mengidentifikasi sektor unggulan yang dapat mengungkit perekonomian Indramayu agar penurunan dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Indramayu dapat segera diatasi melalui. Sehingga jika cara yang tepat telah ditemukan maka Indramayu dapat mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2029.

B. METODE

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pulau Jawa dan PDRB Kabupaten Indramayu diperoleh melalui web Badan Pusat Statistik dengan tahun pengamatan 2024, sesuai dengan ketersediaan data terakhir. Data PDRB Jawa Barat dan PDRB Indramayu berdasarkan Lapangan Usaha atas dasar harga konstan 2010.

Alat analisis yang dipakai untuk menjawab tujuan adalah Analisis *Location Quotient (LQ)*. Pendekatan LQ merupakan suatu teknis analisis yang dimaksudkan untuk menentukan potensi spesifik suatu daerah terhadap aktivitas ekonomi utama, atau untuk menentukan sektor unggulan dimana sektor tersebut dapat memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri dan daerah lainnya.

Analisis *Location Quotient (LQ)* umumnya dipakai untuk melihat perbandingan daerah dengan regional atau nasional. Daerah adalah daerah yang lebih sempit, sementara itu regional atau nasional adalah daerah yang lebih luas. Misalnya: daerah (Kabupaten Indramayu) dengan regional (Jawa Barat).

Analisis LQ yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis Kadariah (1979) dalam (Susanto et al., 2018), yaitu

1. $LQ > 1$, artinya daerah mempunyai basis pada sektor tersebut dan ada kelebihan hasil yang dapat dipasarkan ke daerah lain.
2. $LQ < 1$, artinya daerah tidak mempunyai basis pada sektor tersebut dan ada kekurangan yang dibeli dari daerah lain.
3. $LQ = 1$, artinya hasil sektor tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Aturan main dari *Location Quotient* (LQ) menurut Putra (2011) dalam Adi, L (2017):

1. $LQ > 1$, berarti mengindikasikan dimungkinkannya dilakukan ekspor pada sektor tersebut (*Relative Spezialization in Sector*). Ekspor dilakukan karena adanya surplus.
2. $LQ < 1$, berarti mengindikasikan bahwa sektor tersebut perlu melakukan impor (*Production Deficit in Sector*). Impor dilakukan karena sektor belum mampu memenuhi kebutuhan daerah tersebut.
3. $LQ = 1$, berarti produktivitas sektor tersebut berimbang. Artinya hanya cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu saja sehingga masih belum layak untuk diekspor (*Average Production in Sector*).

C. PEMBAHASAN

1. Kemiskinan

Topik kemiskinan ini menjadi isu populer di era kepemimpinan Presiden Prabowo, yang tercantum dalam Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya pada poin ke-6 yang berbunyi “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”.

Kemiskinan sendiri diartikan sebagai keadaan disaat seseorang atau kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang

harus dipenuhi, bahkan standar hidup layak pun harus diperhatikan, baik karena faktor ekonomi, sosial, maupun struktural.

Kemiskinan diartikan juga sebagai suatu keadaan ketika seseorang atau kelompok tidak mampu memelihara kehidupannya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan lingkungan (Soekanto, 2025).

Definisi lain menurut Abraham Maslow (1943), “kemiskinan dipahami sebagai kondisi ketika individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia (*basic needs*), mulai kebutuhan fisiologis hingga rasa aman.” Pendapat lain menurut Robert Chambers (1983), kemiskinan adalah *deprivation trap* (perangkap kekurangan) yang terdiri dari lima unsur: kemiskinan itu sendiri, ketidakberdayaan, kelemahan fisik, kerentanan, dan keterasingan.”

Berdasarkan ragam referensi di atas, disimpulkan bahwa kemiskinan berupa kondisi multidimensi yang ditandai oleh keterbatasan pendapatan. Kemiskinan juga mencakup keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesempatan kerja yang layak. Persoalan ekonomi bukan hanya yang berkaitan dengan kemiskinan, melainkan juga terkait dengan aspek sosial, budaya, dan politik yang berpengaruh terhadap kualitas hidup seseorang maupun kelompok. Sehingga kemiskinan dipahami sebagai keadaan terbatas yang menghambat individu atau masyarakat untuk hidup layak, mandiri, dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial.

Data pada tahun 2024, Kabupaten Indramayu menjadi daerah termiskin di Provinsi Jawa Barat, sehingga dengan metode penentuan sektor basis dapat menekan angka kemiskinan di daerah tersebut.

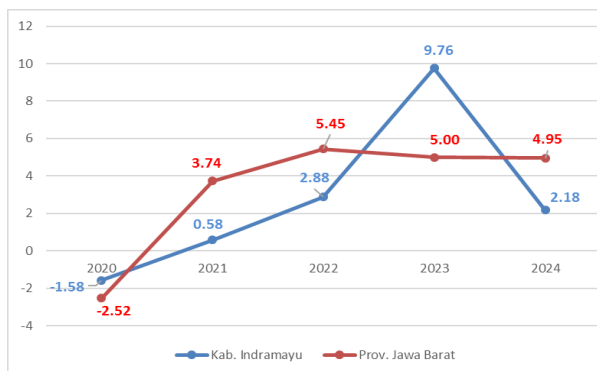
2. Sektor Basis Kabupaten Indramayu

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 9.0

..... POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Tata Kelola Berdampak: Kolaborasi MultiStakeholder Untuk Kesejahteraan Dalam Pilar Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sepanjang tahun 2024 menunjukkan kinerja yang positif, tumbuh baik sebesar 4,95%. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,34%, diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,73%, Informasi dan Komunikasi sebesar 8,20%, dan Jasa Lainnya sebesar 7,93%. Berikut perbandingan laju pertumbuhan PDRB di Indramayu dan Jawa Barat:



Gambar 2. Laju Pertumbuhan PDRB Indramayu dan Jawa Barat Tahun 2020-2024

Sumber: Data BPS diolah (2025).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu tahun 2024 sekitar 2,18% (BPS, 2025), sedangkan laju pertumbuhan PDRBnya dapat dilihat pada Gambar 2. Tren yang tersaji ini memiliki implikasi kebijakan yang signifikan bagi Kabupaten Indramayu. Pertama, adanya disparitas tren pada 2022-2023, di mana Indramayu mengalami kenaikan laju pertumbuhan PDRB sementara Jawa Barat mengalami penurunan, mengindikasikan bahwa sektor basis lokal Indramayu memiliki ketahanan dan daya dorong tersendiri yang relatif independen dari kondisi makro provinsi. Hal ini menunjukkan pentingnya identifikasi dan penguatan spesifik terhadap sektor-sektor unggulan tersebut, seperti pertanian atau perikanan, agar dapat terus menjadi penopang ketika ekonomi di level yang lebih tinggi melambat. Kedua, penurunan tren yang serentak pada periode 2023-2024 menjadi

sinyal peringatan bahwa Indramayu rentan terhadap tekanan ekonomi yang lebih luas, baik nasional maupun global. Implikasinya, strategi pembangunan tidak boleh hanya mengandalkan sektor basis yang sudah ada, tetapi harus diiringi dengan diversifikasi ekonomi dan peningkatan nilai tambah agar mampu meredam guncangan eksternal. Secara keseluruhan, data ini memperkuat urgensi penelitian mengenai Optimalisasi Sektor Basis, sebab sektor tersebut adalah kunci untuk mempertahankan momentum pertumbuhan yang sempat dicapai dan menjadi jangkar ketahanan ekonomi Indramayu di tengah ketidakpastian tren regional. Perbandingan laju pertumbuhan PDRB Jawa Barat dan Indramayu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Tren Laju Pertumbuhan PDRB Jawa Barat dan Indramayu

No	Rentang Tahun	Tren	
		Jawa Barat	Indramayu
1	2020-2021	Naik	Naik
2	2021-2022	Naik	Naik
3	2022-2023	Turun	Naik
4	2023-2024	Turun	Turun

Sumber: Olahan Penulis, (2025).

Tren laju pertumbuhan antara Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Indramayu relatif sama rentang waktu tahun 2020 sampai tahun 2024. Perbedaan laju pertumbuhan PDRB rentang waktu 2022-2023. Pada tahun 2023, Indramayu mengalami peningkatan volume ekonomi yang tercermin dari sisi produksi maupun sisi permintaan akhir. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terjadi pada kategori industri pengolahan, khususnya pengilangan migas. Dari sisi permintaan akhir, didominasi pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang menyumbang 40,42% dari total PDRB Indramayu (BPS, 2024). Dari data PDRB Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Indramayu

(tahun 2020-2024), dapat diketahui sektor basis yang dapat dijadikan data sebagai upaya untuk melepaskan Kabupaten Indramayu

sebagai daerah termiskin di Jawa Barat. Tabel 2 menunjukkan data sektor basis tersebut.

Tabel 2. Sektor Basis Kabupaten Indramayu Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.05	2.08	2.12	2.03	2.05
B. Pertambangan dan Penggalian	6.83	6.67	6.67	6.64	6.55
C. Industri Pengolahan	1.07	1.02	0.96	1.09	1.05
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.15	0.14	0.14	0.15	0.15
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.08	1.05	1.06	1.07	1.04
F. Konstruksi	0.65	0.66	0.72	0.65	0.67
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.71	0.71	0.72	0.74	0.74
H. Transportasi dan Pergudangan	0.56	0.57	0.57	0.59	0.61
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.66	0.65	0.67	0.66	0.66
J. Informasi dan Komunikasi	0.22	0.21	0.21	0.21	0.22
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0.47	0.46	0.47	0.47	0.46
L. Real Estate	0.42	0.41	0.41	0.42	0.42
M,N. Jasa Perusahaan	0.65	0.65	0.67	0.67	0.67
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.07	1.07	1.08	1.08	1.11
P. Jasa Pendidikan	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.64	0.63	0.63	0.64	0.63
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21

Sumber : Olahan Penulis (2025).

Hasil pengolahan LQ (Tabel 2) menunjukkan sektor-sektor basis menurut lapangan usaha, yang dapat dijadikan dasar yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk memanfaatkan data tersebut dalam upaya keluar dari belenggu kemiskinan. Tiga sektor basis tersebut yaitu:

a. Pertambangan dan Penggalian

1. Sejarah dan Kontribusi Migas

Sejak dekade 1970-an, industri migas menjadi sektor unggulan di Indramayu, dengan aktivitas eksplorasi dan produksi di area Jatibarang, Cemara, dan *offshore* lepas pantai. Lapangan-lapangan ini telah menghasilkan minyak bumi dalam jumlah signifikan dan menopang ekonomi daerah. Infrastruktur penting telah dibangun, termasuk kilang minyak Balongan (mulai beroperasi 1994, kapasitas 125.000 BPSD) dan kilang LPG

Mundu VI (kapasitas 37,3 MMSCFD) untuk mendukung distribusi BBM dan LPG regional.

2. Eksplorasi dan Produksi Baru

- Lapangan OO-OX (2024): proyek pengembangan Migas lepas pantai ini diperkirakan meningkatkan produksi hingga 2.996 BOPD (minyak) dan 21,26 MMSCFD (gas).
- Sumur Eksplorasi EAC – 001 (2023): berada di Jatibarang Field, memberikan output sekitar 30 BOPD, 2,08 MMSCFD gas dan 15BCPD Kondensat.
- Sumur ABG-017 (2022) : Produksi melewati target, mencapai 549 BOPD (157% dari target awal).
- Pengeboran di CMR NP-2 (2020): Pertamina EP menargetkan produksi

minyak hingga 350 BOPD melalui sumur Losarang, Indramayu.

3. Dampak Ekonomi Lokal

- Dampak positif terhadap ekonomi lokal tampak dari adanya aktivitas hulu migas (eksplorasi dan produksi), seperti peningkatan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Namun, tantangan seperti pengelolaan lingkungan dan alih fungsi lahan pertanian perlu mendapat perhatian.
- Terkait penggunaan lahan pertanian untuk eksplorasi, Perusahaan Migas diwajibkan memberikan kompensasi dengan menyediakan lahan pengganti 3x lebih luas dari lahan yang digunakan untuk menjaga ketahanan pangan lokal.

Kabupaten Indramayu merupakan pusat sektor pertambangan dan penggalian migas di Jawa Barat, dengan produksi yang terus meningkat melalui sumur-sumur baru, eksplorasi dan inovasi teknologi. Manfaat nyata dari wilayah ini bagi ekonomi lokal adalah untuk menopang ketahanan energi nasional, meski tetap dihadapkan oleh tantangan lingkungan dan penggunaan lahan yang berkelanjutan.

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

1. Sektor pertanian

Tulang punggung ekonomi di Indramayu adalah sektor pertanian khususnya padi, di mana produksinya merupakan tertinggi di provinsi. Potensi peningkatan ekonomi masyarakat pesisir terlihat dari upaya pengembangan, seperti revitalisasi tambak.

Berikut infografis peta persawahan di Kabupaten Indramayu :



Gambar 3. Peta persawahan Indramayu

Sumber : Data diolah (2025).

Indramayu merupakan penghasil padi terbesar bukan hanya di Jawa Barat, tapi terbesar di Indonesia. Pada tahun 2021 produksi mencapai 1,365 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat menjadi 1,49 juta ton pada tahun 2022 dan 900 ribu ton hingga Agustus 2023. Luas sawah produktif mencapai $\pm 41,90\%$ dari total wilayah (± 204.011 ha) dengan produktivitas rata-rata 6,07 ton/ha.

2. Sektor perikanan

Indramayu juga merupakan produsen perikanan terbesar di Jawa Barat. Pada tahun 2023, kontribusi Indramayu tercatat terbesar 34,63% dari total produksi perikanan Jawa Barat, yaitu 551.663 ton, yang terdiri dari:

- 174.132 ton perikanan tangkap
- 377.501 ton perikanan budidaya.

Kontribusi tahun 2024 mencapai 32,70% dari total produksi provinsi ($\pm 1.600.305$ ton). Saat ini pemerintah daerah sedang melakukan revitalisasi lahan tambak seluas 2.875 ha untuk meningkatkan produktivitas perikanan berbasis masyarakat pesisir.

3. Sektor Kehutanan

Kehutanan tetap masuk dalam cakupan sensus pertanian regional, meskipun bukan sektor unggulan. Kegiatan sensus untuk perencanaan pertanian terpadu dilakukan untuk memperoleh kumpulan data (termasuk subsektor kehutanan).

b. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Lapangan Usaha ini mencakup aktivitas ekonomi seperti administrasi pemerintahan, pertahanan, serta layanan jaminan sosial wajib. Berdasarkan struktur organisasi Indramayu (daftar Perangkat Daerah), sub sektornya mencakup:

1. Administrasi Pemerintahan :

- Sekretariat Daerah (Setda)
- Sekretariat DPRD
- Dinas Sosial
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)
- Badan Kepegawaian Daerah (BKPSDM)
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar)
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- Dinas Pendataan dan Layanan Publik lainnya

2. Pertahanan

Tidak tercantum SKPD khusus (karena pertahanan merupakan kewenangan pusat), dan biasanya dicatat dalam Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib secara agregat tanpa unit pemerintahan daerah terpisah.

3. Jaminan Sosial Wajib

- Dinas Sosial: mengelola bantuan, kesejahteraan sosial, dan sistem jaminan tertentu.
- Jaminan Sosial lain (BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan, Taspen) bersifat lembaga non-Perangkat Daerah, namun kegiatan terkait dikoordinasikan oleh Dinas Sosial atau Setda.

Berdasarkan data PDRB Indramayu, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib berkontribusi dalam kategori Lapangan Usaha O. Pada harga berlaku 2019 nilai sekitar 1,974 miliar dan naik menjadi 2,256 miliar di 2021.

3. Optimalisasi Sektor Basis Untuk Meningkatkan Perekonomian Lokal di Kabupaten Indramayu

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat diketahui beberapa sektor basis dari Kabupaten Indramayu. Pertama, dari pertambangan dan penggalian. Kedua, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ketiga, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.

a. Optimalisasi pertambangan dan penggalian.

PDRB Indramayu menurut lapangan usaha pertambangan dan penggalian rata-rata mencapai 6.484,46 milyar rupiah dalam rentang waktu tahun 2020 sampai 2024. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor basis, oleh karena itu perlu dikembangkan dengan tepat, baik dari segi efektivitas maupun efisiensi. Indramayu adalah salah satu wilayah yang memiliki cadangan dan potensi migas baru. Salah satu potensinya adalah Pertamina EP melalui Jatibarang Field mengelola dan

mengoptimalkan produksi dari sumur-sumur yang ada.

Suatu anomali di mana Indramayu masih menjadi daerah termiskin di Jawa Barat, padahal potensi sumber daya alamnya melimpah. Pernyataan tersebut selaras dengan apa yang disampaikan Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang menyampaikan bahwa “kemiskinan merupakan tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Indramayu, padahal memiliki kekayaan SDA yang sangat potensial, seperti migas, pertanian, dan perikanan laut”, ungkapanya dalam beritaindramayu.com. Salah satu isu yang memprihatinkan terkait dengan pertambangan dan penggalian di Indramayu ini adalah maraknya praktik galian C tanpa izin. Galian C untuk pertambangan batuan, dimana bahan (batuan) meliputi berbagai jenis seperti andesit, kaolin, batu apung, pasir besi, dan trass (www.tampahan.com).

Optimalisasi pertambangan dan penggalian dalam meningkatkan perekonomian lokal di Indramayu dapat dilakukan beberapa strategi, diantaranya:

- Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Indramayu, maka perlu didorong kerja sama daerah dengan Badan Usaha Milik Daerah migas.
- Merealisasikan industri turunan dari hasil pertambangan dan penggalian, misalnya mengolah bahan mentah tersebut menjadi pupuk, petrokimia, atau energi terbarukan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menambah nilai tambah suatu barang dan nilai ekonominya dapat berputar di ekonomi lokal di daerah Indramayu.
- Upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar daerah pertambangan dan

penggalian. Tujuannya agar masyarakat lokal berpartisipasi sebagai tenaga kerja yang terlatih, untuk selanjutnya terciptalah pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

- b. Optimalisasi pertanian, kehutanan, dan perikanan

PDRB Indramayu menurut lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan rata-rata mencapai 9.120,28 milyar rupiah dalam rentang waktu tahun 2020 sampai 2024. Sektor ini merupakan sektor basis tertinggi kedua berdasarkan olahan penulis.

Indramayu berhasil meningkatkan produksi sebesar 14,37 ton/hektare Gabah Kering Giling (GKG) pada bulan September 2024 (Badan Standardisasi Instrumen Pertanian) yang merujuk pada berita yang dimuat di www.internationalmedia.id.

Permasalahan dalam pertanian ini seringkali dikarenakan kurangnya kemampuan dalam memasarkan produk pertanian, masih rendahnya harga jual gabah, dan masih minimnya jaminan kepastian hukum atas lahan garapan.

Sekitar 4.400 ha kawasan hutan yang ada di Indramayu sudah siap dijadikan *agroforestry*, yang tersebar di beberapa kecamatan yang memiliki wilayah hutan seperti Gantar, Kroya, dan Terisi. Pola *agroforestry* yaitu pendekatan dengan mengintegrasikan tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan untuk mencapai manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial (indramayukab.go.id). Permasalahan dalam kehutanan adalah kurangnya minat petani muda dalam berkontribusi terhadap sektor kehutanan, banyaknya alih fungsi lahan hutan di luar fungsi kehutanan,

kurangnya upaya konservasi yang berdampak pada keanekaragaman hayati.

Dalam produksi perikanan, Indramayu merupakan daerah penyumbang perikanan terbesar di Jawa Barat pada 2024. Kontribusi Indramayu sebesar 32,70% dari total perikanan Jawa Barat, yang mencapai 1.600.304,93 ton (indramayukab.go.id). permasalahan perikanan mencakup keterbatasan akses informasi daerah penangkapan ikan (DPI), kurangnya akses pasar bagi nelayan, serta kesejahteraan nelayan yang belum meningkat.

Optimalisasi pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam meningkatkan perekonomian lokal di Indramayu dapat dilakukan dengan beberapa strategi, diantaranya:

- Diversifikasi produk dan modernisasi pertanian. Bukan hanya padi, tapi menanam tanaman khas Indramayu dengan penggunaan *smart farming*.
 - Pengelolaan hutan rakyat berbasis *agroforestry*, salah satu contohnya melalui ekowisata mangrove untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus berfungsi menjaga ekologi.
 - Industri pengolahan hasil perikanan yang variatif, diteruskan dengan upaya pengembangan wisata bahari dan kuliner sebagai daya tarik wisata yang dapat memutar roda perekonomian.
- c. Optimalisasi administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib
- PDRB Indramayu menurut lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib rata-rata mencapai 1.177,87 milyar

rupiah dalam rentang waktu tahun 2020 sampai 2024. Sektor ini merupakan sektor basis tertinggi ketiga.

Permasalahan dalam pelaksanaan sektor ini berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan publik oleh stakeholder, pengelolaan keamanan dan penjagaan stabilitas daerah, dan pelaksanaan program jaminan sosial yang merupakan bentuk perlindungan sosial bagi warga.

Optimalisasi administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dalam meningkatkan perekonomian lokal di Indramayu dapat dilakukan dengan beberapa strategi, diantaranya:

- Didukung dengan digitalisasi pelayanan publik. Tujuannya untuk mempercepat proses administrasi dan mempermudah aksesibilitas bagi masyarakat.
- Melakukan perencanaan strategis berbasis data sebagai upaya preventif dalam menjaga keamanan wilayah.
- Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi antara penyedia layanan jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta administrasi pemerintah terkait.

D. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Dari beberapa pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa kemiskinan masih menjadi *core issue* yang harus segera dituntaskan. Bahkan isu kemiskinan ini masuk dalam program Asta Cita Presiden Prabowo. Untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi di Indramayu, maka dibutuhkan solusi. Penulis menemukan bahwa sektor basis yang ada di Indramayu untuk dapat dijadikan solusi dalam mengentaskan kemiskinan. Sektor tersebut adalah pertama, dari pertambangan dan penggalan. Kedua, pertanian, kehutanan, dan

perikanan. Ketiga, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.

Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa sektor basis berpotensi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi lokal jika dikelola secara tepat melalui peningkatan produktivitas, pengembangan industri pengolahan, serta dukungan infrastruktur yang memadai. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat juga diperlukan untuk memperkuat daya saing daerah. Dengan strategi optimalisasi yang terarah, sektor basis diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indramayu.

REFERENSI

- Abubakar, R. R. T. , Ginka, K.R. (2024). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Kamar Kos di Kota Bandung. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 27 (1), 45– 64.
- Abubakar, R. R. T., Prasetya, D.D. (2025). Penerapan E-Government melalui Aplikasi Masagi Musrenbang di Desa Ciburial. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 28 (1), 25 – 42.
- Ahmad, F., Taryono, O. (2021). Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pembangunan Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu. *Jurnal Wacana Kinerja*, 24 (2), 61 – 84. <http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v24i2.701>
- Akbar, R., Prakosa, T., Hutari, A., & Agustina, I. (2023). Progress of Transfer Fund on Metro City, East Lampung Regency and Central Lampung Regency on 2022. *Jambura Equilibrium Journal*, 5(2), 51-63. [doi:https://doi.org/10.37479/jej.v5i2.18930](https://doi.org/10.37479/jej.v5i2.18930)
- Anggraeni, H. N., Nurliawati, N., Sufianti, E., & Taryono, O. (2023). Collaborative Strategies in Efforts to Increase the Innovation Index in Cimahi City Government. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 20(1), 11-28.
- Anomsari, E.A., Abubakar, R.R.T. (2019). Program Pembangunan Partisipatif dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Natapraja:Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 7 (1), 121 – 138. <https://doi.org/10.21831/jnp.v7i1.22157>
- Hisanah, F.A., Ramdani, E.M., Rahmawati, A., Ramdani, D.F. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 8 (1), 430-438.
- Maharani, H.K., Abubakar, R. R. T. , Sufianti, E., Rahmawati, A. (2023). Collaboration Model of Masagi Bersih Program in Supporting the Village Sustainable Development (Study Case: Ciburial Village, Cimenyan District, Bandung Regency, West Java). *Fourth International Conference on Administrative Science (ICAS 2022)*, 71-82.
- Maharani, H.K., Abubakar, R. R. T. (2024). Pembangunan Desa Berkelanjutan: Inovasi Kolaborasi Program Masagi Bersih. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8 (2), 131-144.
- Maysaroh, D., Taryono, O., Sufianti, E., & Iyoega, R. R. (2023). Implementation of the Post-Covid 19 Pandemic Extreme Poverty Alleviation Program in Kebumen District. In *Fourth International Conference on Administrative Science (ICAS 2022)* (pp. 185-199).
- Ramdani, D.F., Abubakar, R.R.T., Dawud, J. (2021). Studi Kebijakan dalam Optimalisasi Pajak dan Retribusi Parkir dalam Mendongkrak PAD di Kota Bandung. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3 (2), 263-269.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 9.0

..... POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Tata Kelola Berdampak: Kolaborasi MultiStakeholder Untuk Kesejahteraan Dalam Pilar Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

- Susiawati, M., Nugraha, H., Priyantoro, A. (2025). Bureaucratic Simplification: Changes in Organizational Structure From Structural to Functional in the Central Java Provincial Government. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 9(1). <https://doi.org/10.29040/ijebar.v9i1.16764>
- Taryono, O., Sufianti, E., & Jubaedah, E. (2025). How do Stakeholders Participate in Waste and Water Security Management? Insights from West Java Province, Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 21(1), 75-90.
- Taryono, O., Mursalim, S.W., Anwar, S. (2021). Strategy for Handling Covid-19 in the Perspectives of Policy Implementation, Community Institutions and Community Participation in Cileunyi Sub-District. *2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, 140 – 145.
- Taufik, N.I., Pradesa, H., & Agustina, I. (2022). Persepsi Risiko Pada Pemerintahan Desa: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Perangkat Desa Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 16(1), 120-135. <https://doi.org/10.32815/jibeka.v16i1.353>
- Wijayanti, R., Taufik, N.I. (2022). The Role of Village Funds to Improve Community Welfare: A Study in West Bandung Regency. *International Journal of Entrepreneurship and Business Development (IJEED)*, 5 (1), 155-163. <https://doi.org/10.29138/ijebed.v5i1.1641>